



23 Titik Kerusakan Belum Tertangani

■ Proposal Dana Bencana Kintamani Tak Kunjung Cair ■ Hari Ini BPBD Tanyakan Langsung ke Jakarta

BANGLI, TRIBUN BALI - Proposal bantuan dana bencana rehabilitasi dan rekonstruksi atas musibah banjir bandang dan tanah longsor yang diajukan ke pusat setahun lalu, hingga kini realisasinya belum jelas. Padahal sesuai rencana, dana tersebut hendak digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana di Kintamani.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangli, I Wayan Karmawan memaparkan, proposal tersebut merupakan hasil pendataan secara rinci dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pemukiman (PUPERKIM) Bangli. Isinya ihwal infrastruktur yang rusak sebagai dampak dari bencana alam banjir dan tanah longsor di Kintamani pada Februari tahun 2017.

Sesuai data, kerusakan tersebut meliputi jalan, jembatan dan lahan pertanian yang perlu mendapat penanganan di 23 titik, dengan total nilai anggaran yang diajukan



KEPALA BPBD BANGLI

yakni sebesar Rp 32 miliar lebih ke Badan Penanggulangan Bencana (BNPB). Karmawan mengakui, BNPB sudah menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi ke lapangan beberapa bulan lalu. Di lain sisi, ia juga tidak menampik bahwa proses penca-

iran dana proposal membutuhkan waktu cukup lama, lantaran proses tersebut memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan.

"Saat ini kami masih menunggu jawaban dari BNPB. Karena dana yang diusulkan sumbernya dari Kementerian Keuangan. Rencananya sore ini (kemarin) kami akan berangkat ke Jakarta, dan besok (hari ini) akan menanyakan prosesnya. Apakah sudah sampai di keuangan atau belum," jelas Karmawan, Minggu (22/7).

Selain mengecek proses proposal bantuan bencana,

pihaknya juga akan mengkoordinasikan kembali terkait pembebasan lahan relokasi bagi korban bencana alam di Dusun Bantas, Desa Songan ke Kementerian Kehutanan, khususnya bidang planologi. "Izin prinsip dari Kementerian Kehutanan ini yang kami koordinasikan kembali setelah berproses dilapangan. Tujuannya agar tidak ada kesalahan dalam pembebasan lahan hutan di Banjar Serongga, Desa Songan, sehingga tukar guling lahan bisa segera dilaksanakan," ucapnya. (mer)

MEMINTA KEJELASAN

- **DANA** bencana Kintamani belum cair hingga kini. Padahal proposal sudah diajukan setahun lalu.
- **HARI INI** BPBD bertanya ke Jakarta apakah proposal sudah sampai apa belum.

KERUSAKAN TERJADI DI 23 TITIK, MELIPUTI

- Kerusakan jalan
- Kerusakan jembatan
- Kerusakan lahan pertanian



- **BNPB SUDAH** menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi beberapa bulan lalu.
- **NAMUN PROSES** pencairan dana proposal membutuhkan waktu cukup lama.
- **PENYEBABNYA** proses tersebut memerlukan persetujuan dari menteri keuangan.

- **KOORDINASI** terkait izin prinsip agar tidak ada kesalahan dalam pembebasan lahan hutan di Banjar Serongga, Desa Songan.

- **BPBD JUGA** akan mengkoordinasikan kembali terkait pembebasan lahan relokasi bagi korban bencana alam di Dusun Bantas, Desa Songan ke Kementerian Kehutanan.

Karyawan Belum Terima Gaji Sejak April

■ Perusahaan Daerah Terbelit Utang hingga Terancam Kolaps

SEMARAPURA, TRIBUN

BALI - Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK), terancam kolaps. Utang membelit perusahaan ini hingga gaji dan iuran BPJS karyawannya belum dibayar beberapa bulan.

Direktur Utama PDNKK Klungkung, I Wayan Sukadana mengungkapkan, saat ini terdapat 10 karyawan yang bekerja di perusahaan daerah yang berlokasi di seputaran Jalan Puputan, Semarapura itu. Semuanya belum menerima gaji sejak bulan April. Sementara, iuran BPJS Kesehatan karyawan belum dibayarkan sejak tujuh bulan lalu.

"Gaji sering saya talangi dulu. Karyawan kes bon ke saya sampai Rp 30 juta. Itu pun belum termasuk saya tidak dapat gaji," ujar Sukadana, Minggu (15/7).

Sementara, iuran BPJS Kesehatan untuk karyawan masih menunggak sejak Januari 2018. Awalnya Sukadana juga mentalangi pembayaran iuran BPJS Kesehatan tersebut untuk lima bulan dari uang pribadi. Namun ternyata ada kebijakan baru dari BPJS bahwa tunggakan harus dibayarkan klop selama enam bulan.

"Pekan ini kami bayar karena ada uang dari pem-

bayaran karcis dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. BPJS kalau tidak salah kami menunggak Rp 7 juta dan gaji pegawai sekitar Rp 17 juta," ungkapnya.

Selain itu, hingga saat ini PDNKK Klungkung juga masih memiliki utang sebesar Rp 180 juta. Sementara piutang hanya sekitar Rp 150 juta yang berasal dari RSUD Klungkung dan BPKPD. Dalam sebulan, PDNKK yang memiliki unit usaha pertakan, jual alat tulis kantor, sarang walet, dan penjualan kain rang-rang Nusa Penida ini dalam sebulan rata-rata mendapatkan pemasukan Rp 35 juta. Biaya operasional di luar utang mencapai Rp 25 juta.

"Tunggakan dan utang ini terjadi karena perputaran uang yang masih lambat. Ini karena SKPD yang biasanya bayar pakai termin, bahkan bisa enam bulan baru bayar," jelas Sukadana.

Secara resmi ia sudah mengajukan surat pengunduran diri selaku Dirut PDNKK per 2 Juli 2018. Sukadana mundur karena akan fokus mengelola akomodasi pariwisata yang di Nusa Penida. Selain itu, ia juga masih sibuk dengan kegiatannya sebagai sekretaris PHRI Klungkung.



TRIBUN BALI/KEA MITA SUPUTRA

MELINTAS - Seorang warga melintas di depan kantor PDNKK Klungkung, Minggu (15/7).

"Saya hendak mengundurkan diri. Tapi secara lisan atau obrolan dengan bupati kira-kira sudah tiga sampai empat kali. Dengan berbagai pertimbangan, baru disetujui

secara lisan sekarang," jelas Sukadana.

Namun demikian, pihaknya tidak serta merta mundur begitu saja. Sebelumnya ia akan mengadakan rapat

dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan serta adminstrasinya. "Setelah semua proses itu, barulah nanti bupati yang memutuskan," ungkap Sukadana. (mit)

Tunggu Laporan

SEKDA Klungkung, I Gede Putu Winastra mengaku belum mengetahui secara pasti kondisi keuangan PDNKK hingga terliit utang serta gaji dan iuran BPJS belum terbayarkan. Ia akan menunggu laporan dari Bagian Ekonomi dan Dewan Pengawas terkait hal itu. "Nanti kami akan koordinasi dengan dewan pengawas terkait kondisi PDNKK," ungkap Winastra.

Meski demikian, ia tidak menampik telah menerima surat pengunduran diri dari Dirut PND-

KK, I Wayan Sukadana. "Kemarin surat pengunduran diri itu telah turun dari bupati, untuk diminta dikaji. Surat itu lalu sudah saya disposisi ke asisten untuk dikaji," jelasnya.

Sementara Dewan Pengawas, I Wayan Ardi-asa belum sempat mengecek kondisi terakhir dari PDNKK. Hal ini karena SK-nya sebagai Dewan Pengawas PDNKK baru turun dari bulan Mei, menggantikan Kadis Tenaga Kerja dan Perindustrian, Gede Kusumajaya. (mit)

Edisi : Senin, 16 Juli 2018

Hal : 5